



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKjIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022**



DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Nyi Ageng Karang, Karanganyar Kode pos : 57711

Telp. (0271) 495925, 495141 Fax. 494705

Website : www.dishub.karanganyarkab.go.id

E-mail : dishub@karanganyarkab.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690215 199001 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Karanganyar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar-----	9
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar -----	11
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2022 -----	13
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah -----	19
Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 -----	19
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019-2020 ---	20
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2022----	21
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan-----	22
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tujuan Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan-----	23
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan -----	24
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan-----	24
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Indikator Kinerja Daerah -----	26
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan-----	26
Tabel 3.11 Capaian Sasaran Indikator Kinerja Daerah -----	27
Tabel 3.12 Realisasi Pelaksanaan Program Kerja-----	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Kinerja Cakupan Tingkat Pembangunan Infrastruktur Perhubungan -----	23
Grafik 3.2	Capaian Kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan -----	24
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan -	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perbaikan infrastruktur perhubungan -----	23
Gambar 3.2	Perbaikan Prasarana Fasilitas LLAJ -----	25
Gambar 3.3	Pengarahan Kepada Juru Parkir -----	25

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar -----	i
Ikhtisar Eksekutif -----	ii
Daftar Tabel -----	iii
Daftar Grafik -----	iv
Daftar Gambar -----	v
Daftar isi -----	vi
BAB I P E N D A H U L U A N -----	1
A. Fungsi Strategis -----	1
B. Maksud dan Tujuan-----	1
C. Dasar Hukum-----	2
D. Gambaran Umum Dinas-----	5
E. Isu Strategis-----	6
F. Sistematis Laporan -----	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS -----	9
A. Rencana Strategis -----	9
1. Tujuan-----	9
2. Sasaran-----	9
B. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan -----	10
C. Ringkasan Perjanjian Kinerja-----	11
D. Rencana Anggaran -----	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -----	16
A. Skala Pengukuran -----	16
B. Capaian Indikator Kinerja Utama-----	17
C. Pengukuran dan Analisa Kinerja -----	17
D. Realisasi Anggaran -----	23
BAB IV PENUTUP -----	27
A. Kesimpulan -----	27
B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang -----	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Fungsi Strategis Dinas Perhubungan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dimaksud, maka Dinas Perhubungan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah di bidang Perhubungan, bidang Lalu lintas dan Angkutan, dan Prasarana dan keselamatan. Secara singkat Dinas Perhubungan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sistem jaringan angkutan orang dan barang, merumuskan bahan rekomendasi perizinan di bidang angkutan umum, perizinan agen bus umum dan fasilitas terminal.
2. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal angkutan orang dan barang.
3. Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pemilik kendaraan wajib uji tentang persyaratan kelaikan teknis kendaraan bermotor.
4. Merumuskan bahan kebijakan dan berbagai ketentuan di bidang lalulintas untuk mewujudkan kondisi lalulintas yang aman, lancar, tertib dan teratur.
5. Merumuskan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pengaturan dan keselamatan lalu lintas serta sarana kelengkapan jalan lainnya.
6. Merumuskan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Analisa Dampak lalulintas dari pihak ketiga dalam setiap pembangunan fasilitas umum.

B. Maksud dan tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi

salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Struktural : Undang-undang No. 22 Tahun 2009
4. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;

- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- x. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah.
- y. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah;
- z. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- aa. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- bb. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- cc. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- dd. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

D. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

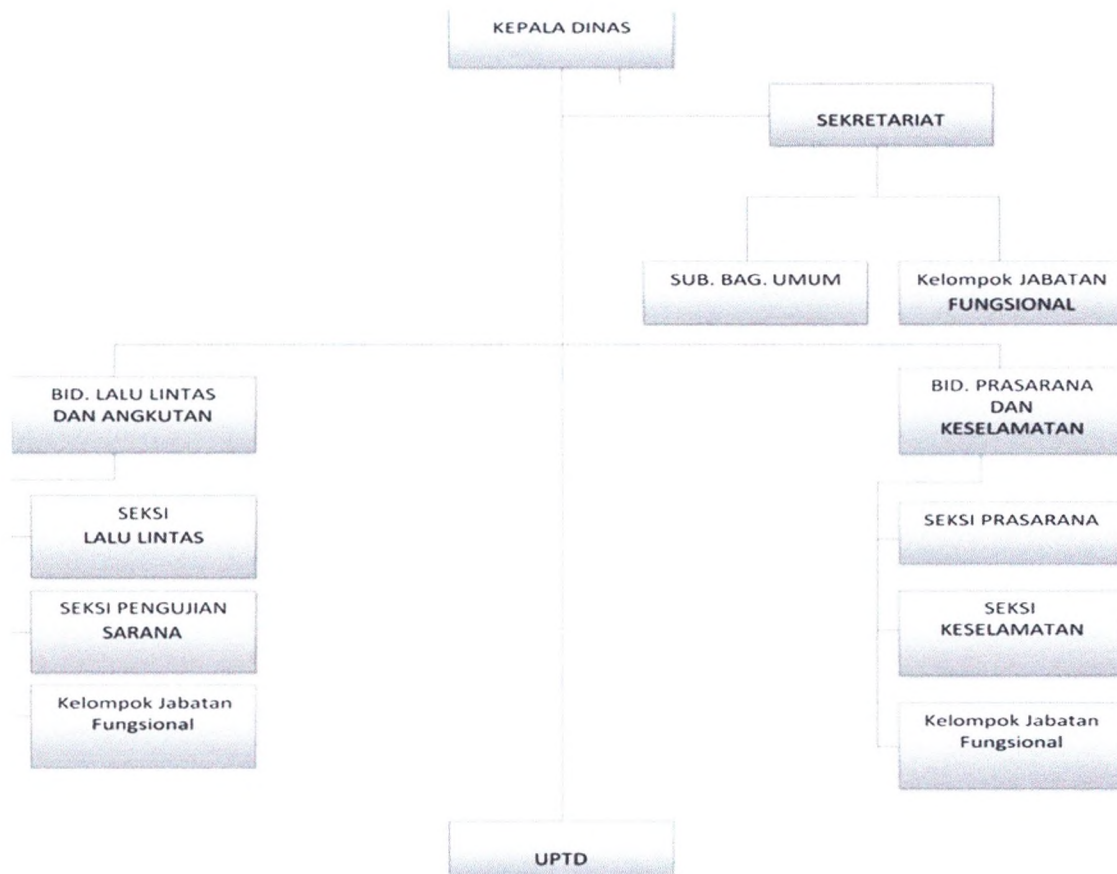
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan serta kesekretariatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di perhubungan serta kesekretariatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan serta kesekretariatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar :



E. Penentuan Isu-isu Strategis

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perhubungan, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan transportasi massal yang murah, nyaman dan terkoneksi;
2. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas;

4. Kurangnya penyediaan perlengkapan perhubungan serta sarana dan prasarana perhubungan;
5. Belum memiliki dukungan kinerja dan layanan perhubungan yang berbasis IT terpadu.

F. Sistematika Pelaporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022. Selanjutnya Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi: Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, landasan hukum penulisan laporan, Maksud dan Tujuan, Gambaran umum Organisasi, dan Sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi: Rencana Strategis Tahun 2018–2023, dan Perencanaan Kinerja Tahun 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Anggaran.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi: Skala Pengukuran, Capaian indikator Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi: Kesimpulan, Saran dan Tindak Lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar menjadi satu kesatuan dalam Renstra Setda Tahun 2018 – 2023.

1. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar menetapkan tujuan yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan”

2. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan.

Secara rinci Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.1**.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan penyelenggaraan perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	1. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan melalui <ol style="list-style-type: none"> a. Reformasi birokrasi perhubungan b. Pengembangan perhubungan c. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan 	1. Mengembangkan sistem manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan sosialisasi/kampanye keselamatan lalu lintas kepada para pengemudi angkutan umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				2. Meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi darat dengan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan konektivitas antar wilayah
2		Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan urusan perhubungan melalui Penyusunan perencanaan, pelaksanaan; evaluasi serta pelaporan kinerja yang efektif dan efisien, Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya SDM teknis perhubungan, Pengelolaan aset secara optimal memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi	Peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah dengan fokus pada penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan kinerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan kapasitas SDM yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAkhlaq)

Tabel 2.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Target Kinerja Pada Tahun Ke-		
							2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan		Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan	Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan	%	NA	50	50	50	71,90	50	60	70
		Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik dibagi jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dikali 100	%	NA	50	50	50	71,90	50	60	70
		Meningkatnya kinerja layanan dan pengelolaan perhubungan	Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun n	Nilai	77,20	78,20	79,20	100,46	100,04	80,20	81,20	82,20
			Nilai Sakip	Nilai SAKIP Tahun n	Nilai	65,60	65,60	65,70	99,09	102,37	65,73	65,74	65,75

B. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah merumuskan Tujuan dan Sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

A. Tujuan dan Sasaran

Sasaran merupakan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan

Sasaran 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja layanan dan pengelolaan perhubungan.

B. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Sesuai dengan perkembangan kebijakan terhadap aturan perundang-undangan, maka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Karanganyar yang diimplementasikan melalui program/ kegiatan/ sub kegiatan harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- d) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- e) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- g) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- h) Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di jalan
- i) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.3.**Rencana Kinerja Tahunan 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	60 %
2	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan	Survey Kepuasan Masyarakat	81.20
		Nilai Sakip	65.74

C. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2022. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Perhubungan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2022 dituangkan ke dalam 2 (Dua) program, yaitu : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ¹, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ², , kemudian dijabarkan ke dalam 16 (Enam Belas) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 12.817.959.000,00 (Dua belas milyar delapan ratus tujuh belas puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu

rupiah) dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 4.702.268.000,00 dan anggaran pendukung administrasi perkantoran sebesar Rp. 8.115.691.000,00. Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Dinas Perhubungan dengan Bupati Karanganyar Tahun 2022 secara lengkap tercantum sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Jabatan : BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 2022

**Pihak Kedua,
BUPATI KARANGANYAR**

**Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

ttd

Drs. H. JULIYATMONO, M.M, M.H

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik 	60 %
2	Meningkatnya kinerja layanan dan pengelolaan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Survey Kepuasan Masyarakat 	81,20
		<ul style="list-style-type: none"> Nilai Sakip 	65,74

Program		Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	8.115.691.000
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rp.	4.702.268.000
JUMLAH		Rp.	12.817.959.000

Karanganyar, 2022

BUPATI KARANGANYAR

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Drs. H. JULIYATMONO, M.M, M.H

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

	Kegiatan SEKRETARIAT	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.678.371.000	DAU
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5.000.000	DAU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410.900.000	DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.560.000	DAU
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.800.000	DAU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.360.000	DAU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.700.000	DAU

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN			
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	80.720.000	DAU
2	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	887.800.000	DAU
3	Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	377.600.000	DAU
4	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	130.000.000	DAU

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN			
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten /Kota	992.483.200	DAU
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	620.000.000	DAU
3	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	509.039.000	DAU
4	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten /Kota	5.875.000	DAU
5	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota	1.098.750.000	DAU

D. Rencana Anggaran

Struktur anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.442.001.000,00, belanja administrasi perkantoran Rp. 8.115.691.000,00 dan belanja pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 4.702.268.000,00 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pencapaian indikator sasaran tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Rumus yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas dua jenis, yaitu maximize (tingkat realisasi positif) dan minimize (tingkat realisasi negatif). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus Maximize (Tingkat Realisasi Positif)

Rumus maximize berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan atau IKU yang target kinerja per tahun semakin meningkat.

Rumus Maximize :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus Minimize (Tingkat Realisasi Negatif)

Rumus minimize berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan.

Rumus Minimize :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN	KODE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

B. Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Pengukuran capaian target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022		Capaian
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	60 %	66,19 %	110,31 %
2.	Survey Kepuasan Masyarakat	81,20	77,825	95,84 %
	Nilai Sakip	65,74	68,88	104,77 %

Sumber : Data Diolah, 2022

C. Pengukuran dan Analisis Kinerja

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sebagaimana dalam **Tabel 3.3** berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019-2020

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Meningkatkan pelayanan transportasi darat	Persentase layanan angkutan darat	%	6	5,6	93	7	3,4	48,57
	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	%	72	66	91	75	70	93,33
	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Penurunan Angka Kecelakaan	%	0,70	1,40	200	0,69	0,71	97,10
B	Meningkatkan kualitas perumahan, kawasan permukiman dan penanganan pertanahan	Persentase perumahan dan permukiman yang tertata sesuai standart	%	1	1	100			
	Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman	Rasio rumah layak huni	rasio	0,24	0,24	0,97			
	Menurunnya luasan permukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan	%	1,2	0,92	76			
	Meningkatnya PSU perumahan yang bersertifikat	Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat	%	5	0	0			

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada pencapaian tujuan 1 (satu) yaitu Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat tahun 2019 persentase capaian sebesar 93% mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 48,57%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 mengalami pandemi COVID-19 sehingga terjadi pembatasan mobilitas pada masyarakat umum yang mengakibatkan dampak pada pelayanan angkutan darat terutama transportasi mengalami banyak mengalami penurunan pelayanan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 juga terjadi refocusing anggaran karena adanya pengalihan anggaran untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 sehingga berdampak pada kinerja Dinas Perhubungan pada saat itu. Dampak ini juga membawa kepada dampak kepada penyediaan transportasi umum yang mengalami pembatasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada saat masa pandemi tersebut. Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar juga mengalami

perubahan struktur organisasi yang awalnya Dinas Perhubungan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dimana Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 masih bergabung dengan DISHUBPKP yang kemudian pada tahun 2020 bidang ini bergabung dengan DPUPR.

Untuk pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat Yang Aman Dan Nyaman Bagi Masyarakat terealisasi pencapaian kinerja tahun 2020 sebesar 93,33%. Capaian kinerja ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 91%.

Untuk pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas terealisasi pencapaian kinerja tahun 2020 sebesar 97,10%. Capaian kinerja ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 200%. Hal ini di dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas sehingga dapat membantu pengurangan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun sebelumnya yang cukup tinggi.

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun tahun 2021 sampai dengan 2022 akan disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 2 (dua) tahun sebagaimana dalam Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan	Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan	%	50	68,93	137,86	60	66,19	110,31
	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik		50	68,93	137,86	60	66,19	110,31
	Meningkatnya kinerja layanan dan pengelolaan perhubungan	Survey Kepuasan Masyarakat	%	80,20	79,38	98,97	81,20	77,82	95,84
		Nilai Sakip	%	65,73	68,88	104,79	65,74	Blm ada penilaian	-

Sumber : Data diolah, 2022

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan juga penanganan COVID-19 maka terjadi perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Sehingga indikator kinerja utama dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar juga ikut berubah seiring berubahnya RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 tersebut. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 tersebut menjadi dasar Perubahan Renstra Dinas Perhubungan 2018-2023 yang juga ikut berubah beserta indikator-indikator yang harus dicapai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pencapaian kinerja tujuan 1 (satu) pada tahun 2022 sebesar 110,31% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 137,86%. Penurunan ini sebesar 27,55% dari pada tahun sebelumnya. Namun realisasi yang didapatkan sudah melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk capaian kinerja pertahunnya selama 2 (dua) tahun selalu tercapai dengan tingkat capaian lebih dari 100%.

Untuk pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan terealisasi pencapaian kinerja tahun 2022 sebesar 110,31% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 137,86%. Penurunan ini sebesar 27,55% dari pada tahun sebelumnya. Untuk pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja Layanan Dan Pengelolaan Perhubungan terealisasi pencapaian kinerja tahun 2022 sebesar 95,84% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 98,97%. Penurunan ini sebesar 3,13% dari pada tahun sebelumnya.

2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan

Indikator tujuan Dinas Perhubungan secara eksplisit tercantum pada dokumen RENSTRA tetapi merupakan penjabaran dari indikator kinerja tujuan dibandingkan terhadap target akhir periode RENSTRA seperti pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan

No.	Indikator kinerja Utama	Capaian 2022		Capaian
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan	60 %	66,19 %	110,31 %

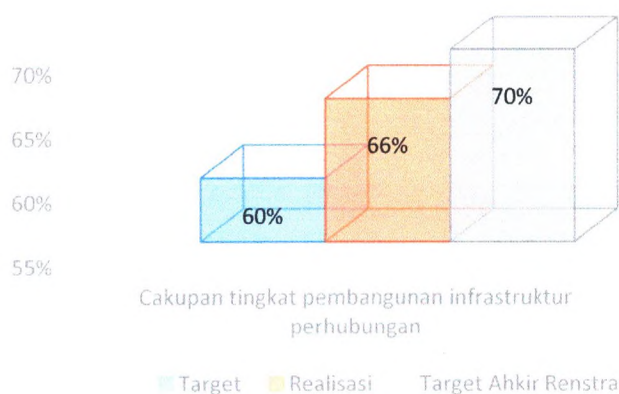
Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tujuan Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2022	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan	66,19 %	70 %	94,55 %

Sumber : Data diolah, 2022

Meningkatnya Penyelenggaraan perhubungan



Grafik 3.1 Capaian Kinerja Cakupan Tingkat Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Capaian kinerja tujuan Dinas Perhubungan untuk tahun 2022 diatas sebesar **110,31 %** dikategorikan **sangat tinggi**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan.

Gambar. 3.1 Perbaikan infrastruktur perhubungan



3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2022, yaitu :

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran yang dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

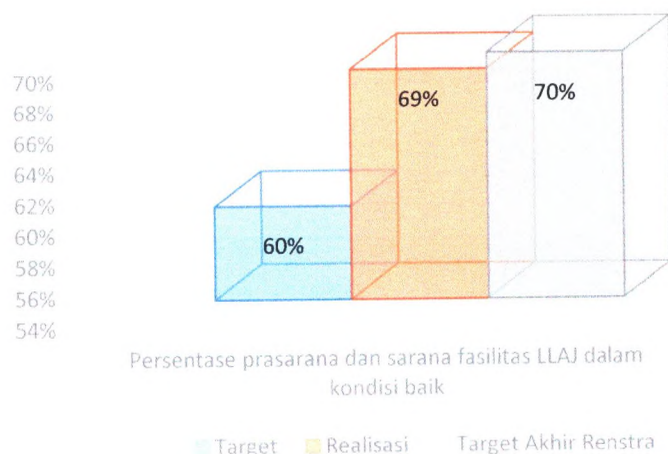
No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	60 %	66,19 %	110,31 %
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					110,31%

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2022 (%)	Target Akhir Renstra (%)	Capaian Tahun 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	66,19 %	70 %	94,55 %

Sumber : Data Diolah, 2022



Grafik 3.2 Capaian Kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Capaian kinerja sasaran 1(satu) untuk tahun 2022 diatas sebesar 110,31% dikategorikan **sangat tinggi**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik dibagi jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dikali 100.

Program pendukung sasaran 1(satu) antara lain :

1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Gambar 3.2 Perbaikan Prasarana Fasilitas LLAJ



Gambar 3.3 Pengarahan Kepada Juru Parkir



Sasaran 2. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

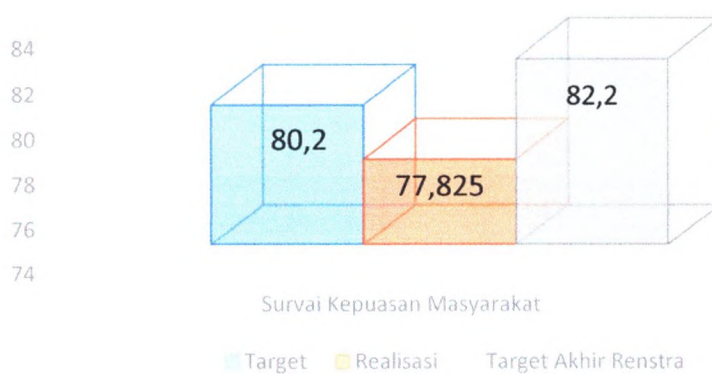
No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,20	77,825	95,843%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					95,843 %

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2022	Target Akhir Renstra	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Survey Kepuasan Masyarakat	77,825	82,20	94,67 %

Sumber : Data Diolah, 2022



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan

Capaian kinerja sasaran 2(dua) untuk tahun 2022 diatas sebesar **95,843 %** dikategorikan **sangat tinggi**. Hal ini dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut : target dikurangi realisasi dikurangi target dibagi target dikali 100. Pada capaian kinerja sasaran 2(dua) ini menggunakan rumus penghitungan *maximize* atau tingkat realisasi positif. Penghitungan ini menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan. Semakin tinggi maka akan semakin baik kinerja yang dicapai. Program pendukung sasaran 2(dua) antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

4. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Untuk IKD (Indikator Kinerja Daerah), sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, terdapat 1 (satu) indikator Urusan Perhubungan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan	persen	60 %	66,19 %	110,31 %

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran capaian sasaran indikator kinerja daerah sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran indikator daerah

Capaian kinerja sasaran indikator daerah tahun 2022 adalah sebesar **110,31%** atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja "**Sangat Tinggi**"

5. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala dalam pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 yaitu :

- 1) Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah usang dan tidak dalam kondisi yang baik sehingga memerlukan peremajaan yang memerlukan pembiayaan cukup tinggi baik dalam pemeliharaan maupun dalam memperbaikinya. Seperti peralatan APILL yang sudah tua dan memerlukan penggantian suku cadang yang tidaklah mudah mengingat usia APILL yang sudah lebih dari 10 tahun. Serta Sarana Prasarana Keselamatan Jalan sering mengalami kerusakan karena faktor cuaca dan kurangnya kendaraan operasional lapangan yang digunakan untuk kegiatan rutin baik dalam pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam giat pengecekan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- 2) Alat Uji Kendaraan Bermotor rata-rata sudah berumur tua sehingga penggunaannya tidak optimal.
- 3) Pada kegiatan-kegiatan tertentu, pelaksanaannya bersifat monoton tidak ada inovasi maupun survey terhadap dampak kegiatan sehingga keberhasilan kinerja output tidak bisa mewakili gambaran outcome.
- 4) Belum tumbuhnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam membudayakan tertib berlalu lintas dan tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan

bermotor yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan atau jaringan jalan.

- 5) Terbatasnya anggaran APBD yang dikelola sehingga pencapaian sasaran melalui beberapa kegiatan harus dilaksanakan secara bertahap baik itu dibidang perhubungan,

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tahun anggaran 2022, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 12.871.959.000,00 ,- (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja administrasi perkantoran Rp. 8.115.691.000 ,-
2. belanja pendukung Sasaran Strategis Rp. 4.702.268.000 .-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 529.547.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Pelaksanaan Program Kerja

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.115.691.000	7.022.799.532	86,53
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.678.371.000	5.609.717.294	84,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.528.371.000	5.460.012.494	83,64
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	149.704.800	99,79
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	5.000.000	5.000.000	100,00
1	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410.900.000	406.395.600	98,90
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	85.000.000	84.000.000	98,82
2	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	15.000.000	14.987.600	99,92
3	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	310.900.000	307.408.000	98,88
	Aministrasi umum perangkat daerah	257.560.000	257.282.686	99,89
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	4.991.000	99,82
2	Fasilitasi kunjungan tamu	80.000.000	79.974.500	99,75

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
3	Penyediaan bahan logistik kantor	40.000.000	40.000.000	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.560.000	101.337.886	99,78
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	9.979.300	99,79
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.800.000	200.535.500	96,04
1	Pengadaan Mebel	15.800.000	13.180.000	83,42
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.000.000	112.352.800	99,43
3	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	80.000.000	75.002.700	93,75
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.360.000	273.040.005	98,44
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.360.000	52.357.153	99,99
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000	155.802.852	97,38
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000	44.880.000	99,73
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.700.000	270.827.647	97,52
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.250.000	150.991.247	99,17
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	9.716.800	64,78
3	Pemeliharaan Mebel	6.250.000	6.240.000	99,84
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.890.000	99,27
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.800.000	99,60
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.200.000	39.190.400	99,98
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.702.267.800	4.026.238.255	85,62
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	80.720.000	74.000.000	91,67
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	80.720.000	74.000.000	91,67
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	992.483.000	971.802.555	97,91

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	340.000.000	338.600.225	99,59
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	560.483.200	555.502.330	99,11
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	92.000.000	77.700.000	84,46
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	887.800.000	879.339.900	99,05
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	887.800.000	879.339.900	99,05
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	377.600.000	376.051.500	99,58
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.000.000	64.731.500	99,59
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	312.600.000	311.320.000	99,59
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	620.080.000	608.022.700	98,05
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	325.000.000	314.855.000	96,88
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	295.080.000	293.167.700	99,38
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	509.039.800	501.439.900	98,51
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	509.039.800	501.439.900	98,51
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.875.000	5.731.700	97,56
1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5.875.000	5.731.700	97,56
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	130.000.000	130.000.000	100,00
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	130.000.000	130.000.000	100,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.098.750.000	479.850.000	43,67
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.098.750.000	479.850.000	43,67
	JUMLAH TOTAL	12.871.959.000	11.049.037.787	86,20

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2022

E. Analis Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat alokasi anggaran sehingga perlu adanya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)	
A.	Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan	Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan	60	66,19	110,31	12.871.959.000	11.049.037.787	86,20	13,80
	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	60	66,19	110,31	4.702.267.800	4.026.238.255	85,62	14,38
	Meningkatnya kinerja layanan dan pengelolaan perhubungan	Survey Kepuasan Masyarakat	81,20	77,82	95,84	8.115.691.000	7.022.799.532	86,53	13,37

Sumber : Data Diolah, 2022

Dalam rangka pencapaian tujuan 1 (satu) yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan terealisasi anggaran sebesar Rp 11.049.037.787,00 atau 85,20% dari total pagu sebesar Rp 12.871.959.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,80% dari pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 1.822.921.213,00. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

Untuk pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan terealisasi anggaran sebesar Rp 4.026.238.255,00 atau 85,62% dari total pagu sebesar Rp 4.702.267.800,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,38% dari pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 676.029.545,00. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

Untuk pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dan Pengelolaan Perhubungan terealisasi anggaran sebesar Rp 7.022.799.532,00 atau 86,53% dari total pagu sebesar Rp 8.115.691.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,37% dari pagu yang dianggarkan yaitu sebesar

Rp 1.092.891.468,00. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target nilai tercapai dilihat dari nilai SKM Dinas Perhubungan dengan capaian 95,84% terpenuhi dengan baik. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pengukuran serta analisis terhadap rencana kegiatan, rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencapaian indikator *output* dan pencermatan terhadap *outcome* yang telah berhasil dicapai, diperoleh gambaran mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2022.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam 2 program yang meliputi 15 kegiatan rutin. Secara khusus sasaran strategis terlihat dari indikator-indikator kegiatan non rutin yang masuk dalam 2 program dibawah ini:

1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, pelaksanaan program kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2022 dapat berjalan efektif dan efisien. Tugas-tugas yang diberikan telah dilaksanakan secara benar, terorganisir dan berjalan sesuai jadwal. Dalam hal kinerja keuangan, serapan anggaran terlaksana secara maksimal, terlihat dari anggaran sebesar Rp. 12.817.959.000,00 realisasi sebesar Rp. 11.049.037.787,00 atau 86,20% dari total anggaran. Semua keberhasilan pencapaian kinerja tidak semata-mata dinilai dari terserapnya anggaran dan terwujudnya output kegiatan, namun secara keseluruhan upaya mewujudkan kinerja yang optimal adalah hasil dari dijalankannya fungsi manajemen. Konsekuensi menjalankan fungsi manajemen dengan mengoptimalkan alat-alat sarana (*tools*) manajemen berimbas pada tercapainya 2 (dua) sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan

Namun disadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja tidak luput dari permasalahan, dan kendala yang ada. Oleh karena itu keberhasilan ini selalu masih menyisakan kekurangan-kekurangan yang harus diselesaikan dan dituntaskan dengan mengedepankan solusi.

B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Adapun strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat diformulasikan pada analisa matrik SWOT sebagai berikut :

		KEKUATAN	KELEMAHAN
	Faktor Internal	Komitmen aparaturn Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
	Faktor Eksternal	Tersedianya fasilitas pengendali traffic light secara terpadu dengan menggunakan ATCS	Peralatan yang dimiliki sekarang ini sangatlah terbatas jumlahnya dan belum maksimal
		Tersedianya fasilitas monitoring lalu lintas yang terpusat dengan menggunakan CCTV	Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki
		Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor	Gedung pengujian yang digunakan saat ini sudah tua dan memerlukan perawatan yang memakan biaya cukup tinggi tiap tahunnya
		Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peralatan pengujian yang digunakan saat ini sudah cukup berumur sehingga memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi
	TANTANGAN	Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan system jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan penegakan hukum dan disiplin di jalan, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah.	Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem pasarana lainnya
		Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor belum maksimal yang diindikasikan dengan sudah mulai berumurnya peralatan-peralatan yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor serta belum tercukupinya tenaga teknis penguji ;	
	TANTANGAN	Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi pada saat liburan atau pun <i>long weekend</i> sehingga menambah kemacetan diberbagai ruas jalan ;	Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan system jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan penegakan hukum dan disiplin di jalan, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah.
			Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem pasarana lainnya

	KEKUATAN	KELEMAHAN
Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan ;		

Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar setidaknya terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Karanganyar, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690215 199001 1 002